



**EFEKTIVITAS KERJA SAMA INDONESIA – TIONGKOK  
DALAM UPAYA PEMBERANTASAN JARINGAN SINDIKAT NARKOBA  
DI WILAYAH INDONESIA TAHUN 2012-2014**

Bimasakti Aryo Bandung

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRACT**

Indonesia has become an emergency country on drug problem in 2015 where narcotic-drug spread all over the country's provinces. Those situations were realized by BNN as the prime government organization for Narcotic crime in Indonesia with the main source of this problems is China. So that, the Indonesia and Chinese Governments established Memorandum of Understanding (MoU) for eradication of illicit drug syndicates in 2012. The purpose of this research is to know the effectiveness of a relation between Indonesia and China in eradicating illicit drugs syndicates. The research methodologies are with qualitative method, descriptive-analysis type of research, and the data collection of interview and literature review type. Since the MoU activated in 2012, a qualitative analysis of effectiveness did in purpose of testing the relations between Indonesia and China based on three parameters, which are: communication intensity, result of eradication, and appreciation. Results from the analysis based on the parameters will prove that the cooperation between the nations are effective and can be refer to 'Golden Triangle'. The reason of this results are because there were an increasing number in disclosure of the case and people arrest that affected to the reduction of the drugs users in 2014.

**Keywords:** *bilateral cooperation, effectiveness, eradicating, Indonesia, China, narcotic syndicate*

**PENDAHULUAN**

Narkoba merupakan ancaman nyata bagi Indonesia. Pada masa presiden saat ini, Joko Widodo, mengatakan bahwa Indonesia darurat narkoba ([www.elshinta.com](http://www.elshinta.com), 2015). Keadaan tersebut bukanlah tanpa alasan, melainkan telah dibuktikan dengan tersebar luasnya narkoba di Indonesia. Analis Deputi Rehabilitasi, Susanti Lengkon, mengatakan bahwa sejak tahun 2008 peredaran narkoba sudah mencakup 33 provinsi di Indonesia yang berarti tidak ada provinsi bebas dari narkoba. Susanti Lengkon kembali menambahkan bahwa Peredaran narkoba saat ini tidak hanya berada di perkotaan melainkan juga telah beredar luas di pedesaan dan wilayah terpencil ([m.tempo.co](http://m.tempo.co), 2014).

Peredaran narkoba yang telah meluas hingga ke 33 provinsi Indonesia merupakan akumulasi dari fakta lain dimana Indonesia telah menjadi negara produsen, transit, dan konsumen. Indonesia sebagai negara produsen dibuktikan dengan adanya lokasi produksi

yang sudah terkenal adalah *Kampung Ambon*<sup>1</sup> di Jakarta yang sebenarnya dikatakan oleh Polri sudah bebas narkoba sejak 2014. Namun, *Kampung Ambon* yang telah terlepas dari narkoba tidak membuat negara Indonesia lepas dari narkoba, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jendral Polisi Sutarman, mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang jadi pengguna sekaligus produsen narkoba (www.dw.de, 2015).

Indonesia yang menjadi negara transit dibuktikan melalui banyaknya kasus-kasus penyelundupan dari luar negeri, seperti : Australia, Malaysia, Tiongkok, dan Hong Kong melalui “pintu utama” pelabuhan-pelabuhan di Jakarta, Batam, Pontianak, Surabaya, dan Denpasar. Para sindikat memanfaatkan pengawasan perbatasan yang lemah, karena banyak kapal yang bisa beroperasi melewati laut tanpa pengawasan (www.dw.de, 2015).

Indonesia sebagai negara konsumen atau pasar. Sindikat dan pengedar narkoba memanfaatkan jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 250 juta. Keberhasilan pengedar narkoba ini dibuktikan dengan tingginya jumlah pengguna narkoba yang berada diangka 4,1 juta. Hal tersebut masih jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan pengguna narkoba tercatat di Tiongkok pada tahun yang sama yang berjumlah 2,7 juta berbanding total penduduk Tiongkok yang mencapai lebih dari 1 miliar jiwa (NNCC, 2015). Selain itu, alasan Indonesia menjadi lahan bisnis bagi para pengedar adalah tingginya keuntungan yang didapat jika menjual di Indonesia. Keuntungan bersih dari penjualan narkoba di Indonesia mencapai 400 juta rupiah (www.selasar.com, 2014).

Ketiga faktor tersebut menyebabkan jaringan sindikat narkoba dapat tumbuh dan beroperasi di Indonesia. Namun, jika ditelaah dalam hal produksi narkoba, Indonesia bukanlah prioritas produksi narkoba bagi sindikat internasional. Produsen narkoba untuk pasar Indonesia adalah Tiongkok dimana Kepala BNN saat ini, Budi Waseso, mengatakan bahwa Tiongkok merupakan produsen methamphetamine, shabu, dan heroin terbesar di Asia dimana negara-negara ASEAN dijadikan tempat transit sekaligus pemasaran. Produksi itu tepatnya berada di Kota Guang Zhou (www.haluankepri.com, 2016). Selain negara-negara ASEAN, Budi Waseso juga memberi pernyataan di kesempatan lain yang mengatakan bahwa Hong Kong merupakan tempat persinggahan sementara sebelum narkoba itu diselundupkan ke Indonesia (www.antaranews.com, 2016). Hal itu memang benar dimana para sindikat Tiongkok dan Hong Kong seringkali memanfaatkan Eks Tenaga Kerja asal Indonesia (TKI) (rri.co.id, 2014).

Keterkaitan sindikat Tiongkok dengan Indonesia yang terutama melewati Hong Kong<sup>2</sup> sebagai tempat singgah sementara dibuktikan dalam beberapa kasus. Pertama, kasus Bandar narkoba dari Indonesia Freddy Budiman yang terbukti memasarkan narkoba yang berasal dari Tiongkok. Kontainer milik Freddy Budiman berangkat dari Pelabuhan Lianyungan, Shenzhen, Tiongkok dengan tujuan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta (megapolitan.kompas.com, 2013).

Kasus lainnya terjadi pada 10 Februari 2014, dimana Kepolisian Indonesia berhasil menangkap sindikat narkoba Tiongkok – Hong Kong di Jakarta yang membawa narkoba jenis sabu (www.republika.co.id, 2014). Beberapa hari kemudian, tepatnya 21 Februari 2014 sindikat internasional asal Tiongkok tertangkap oleh Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. Tersangka sindikat ini berjumlah 8 orang. Jalur yang digunakan oleh sindikat ini adalah dari Tiongkok ke Malaysia, kemudian ke Indonesia. Di Bandara Soekarno-Hatta,

---

<sup>1</sup> *Kampung Ambon* adalah nama lain dari perumahan warga yang dikenal sebagai sumber produksi narkoba yang terkenal di Indonesia tepatnya di Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.

<sup>2</sup> Hong Kong merupakan wilayah administratif khusus milik Tiongkok. Kepemilikan Tiongkok atas Hong Kong didasari dalam *Sino – British Joint Declaration 1984* yang berisi tentang pemindahan kedaulatan dan administrasi wilayah Hong Kong dari pemerintahan Britania Raya ke Tiongkok. Pada tahun 1997, sesuai dengan deklarasi yang disetujui Hong Kong menjadi wilayah administratif Tiongkok dengan sistem “*one state, two system*” (Russell, 2001: 306).

salah satu tersangka berhasil tertangkap dengan barang bukti 1 ons sabu. Pengungkapan kasus ini berlanjut hingga terungkap barang bukti sabu seberat 6,5 kilogram (www.republika.co.id, 2014). Sindikat lain yang terungkap adalah sindikat Hong Kong-Indonesia pada oktober 2014. Polisi mengungkap sindikat ini dengan total barang bukti 22 kilogram sabu (megapolitan.kompas.com, 2014).

Semua kasus di atas merupakan sedikit contoh dari banyaknya kasus dan permasalahan narkoba yang terkait diantara ketiga negara. Sumber utama narkoba di Indonesia yang berasal dari Tiongkok, membuat kerja sama pemberantasan dibutuhkan untuk mempermudah pemberantasan yang dilakukan BNN. Maka dari itu, Kerja sama pun ditetapkan pada 23 Maret 2012 antara pihak Indonesia dan Tiongkok dalam Nota Kesepahaman yang bernama “Memorandum saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok tentang Kerja Sama dalam Pengawasan Narkotika dan Obat Terlarang, Bahan-Bahan Psikotropika, dan Kimia Prekursor” (treaty.kemlu.go.id).

## PEMBAHASAN

Kerja sama Indonesia dan Tiongkok di bidang pemberantasan sindikat narkoba ini dilakukan melalui instansi BNN – NNCC – NBHP. Bentuk-bentuk kerja sama yang telah dijalankan oleh ketiga instansi berjumlah dua, yaitu: kunjungan kerja dan pertukaran informasi intelejen.

Kunjungan kerja antar instansi pernah dilakukan oleh BNN dan NNCC. Diawali oleh BNN pada 29 Oktober 2012 yang mengunjungi kantor NNCC. Kunjungan BNN ke Tiongkok ini diwakili Deputy Pemberantasan pada saat itu, Benny Mamoto, dengan tujuan memperkuat maksud dari penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut. Kunjungan ini juga memiliki tujuan untuk meminta NNCC menerapkan pola kerja sama pemberantasan perdagangan narkoba Sungai Mekong, yang melibatkan Tiongkok dan negara anggota ASEAN, khususnya Laos dan Myanmar dengan memanfaatkan teknologi geo-spasial<sup>3</sup> dan *remote sensing*<sup>4</sup> untuk melacak penanaman pohon opium/ganja (indonesian.cri.cn, 2012).

Kunjungan selanjutnya dilakukan oleh NNCC ke Indonesia pada Oktober 2014. Kunjungan ini diisi dengan *Courtesy call* dengan Kepala Direktorat Tindak Pidana Narkoba Polri dan Kepala BNN RI. Hari selanjutnya dilaksanakan kunjungan ke Balai Rehabilitasi dan Balai Diklat BNN di Lido, Sukabumi (Saputra, 2015: 99). Selain kunjungan di atas, delegasi NNCC membe rikan pemaparan presentasi tentang situasi kejahatan narkoba disana, kemudian upaya Cina dalam menanggulangi kejahatan narkoba dan obat terlarang. Setelah dilakukannya upaya, mereka juga memberikan gambaran hukuman di Tiongkok bagi tersangka yang melakukan kejahatan tindak pidana narkoba (Saputra, 2015:99).

Bentuk kerja sama lainnya adalah pertukaran informasi antar intelejen. Pertukaran informasi ini berupa: Pertukaran informasi tersangka dan jaringan sindikat peredaran serta pengembangan pengungkapan kasus; dan pertukaran informasi dari hasil pemantauan pengiriman barang mencurigakan (*Controlled Delivery*) (Polri, 2013). Sistem komunikasi yang digunakan oleh ketiga pihak ini didapat dari Interpol. Interpol sejak lama telah

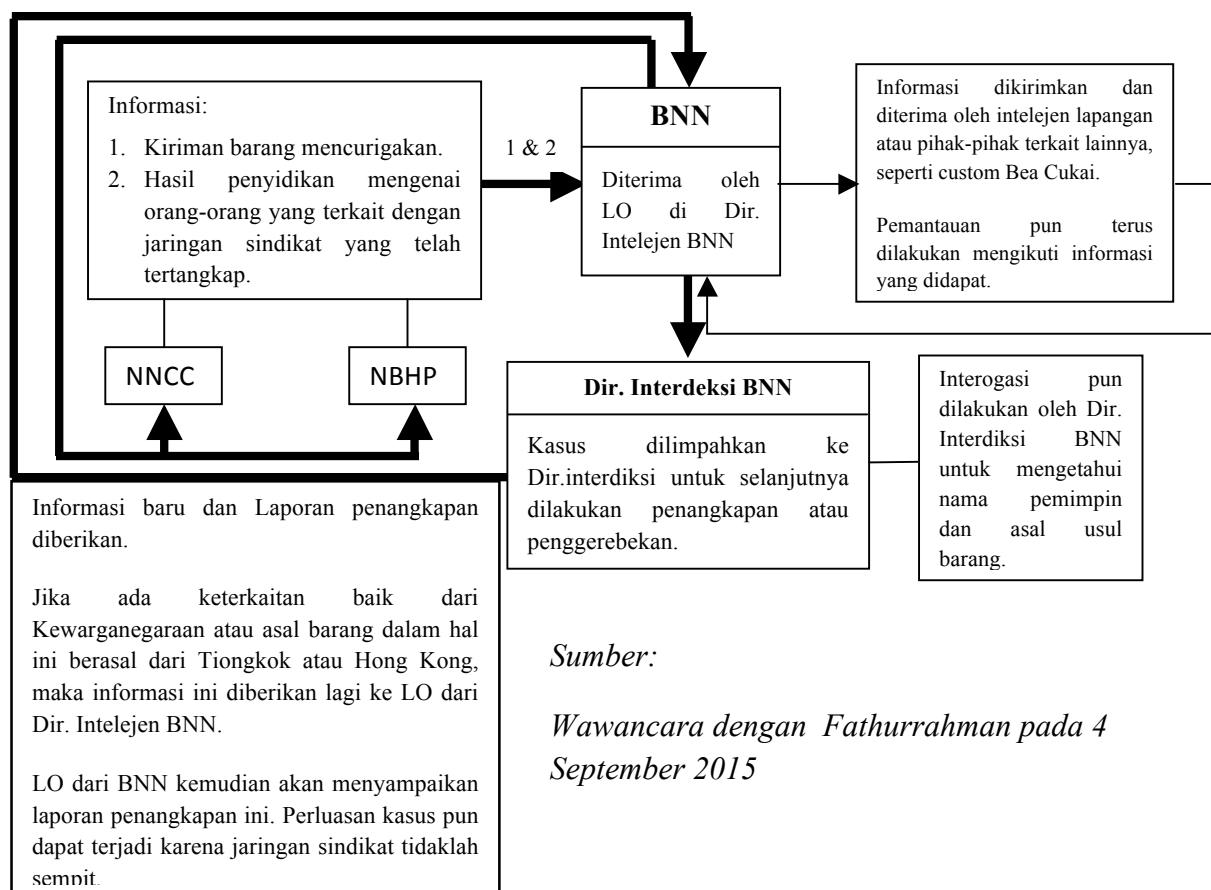
---

<sup>3</sup> Geo-spasial menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial pasal 1-4 menerangkan, spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya. Geospasial sendiri atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.

<sup>4</sup> *Remote sensing* memiliki nama lain Penginderaan jauh (Inderaja). Inderaja merupakan pengukuran atau penangkapan objek geografis yang didapat melalui alat dari jarak jauh, seperti: Pesawat, Satelit, Drone, Kapal, dan lain-lain.

menggunakan sebuah teknologi telekomunikasi canggih yang disebut dengan *Interpol Global Communication System* (IGCS) atau lebih dikenal dengan sebutan “I-24/7”<sup>5</sup> (Polri, 2012). Kerja sama pertukaran informasi ini memiliki skema yang digambarkan di bawah ini:

**Gambar 1**  
**Skema Pertukaran Informasi dan Tindak Lanjut Penangkapan BNN**



*Sumber:*

*Wawancara dengan Fathurrahman pada 4 September 2015*

Gambar di atas menjelaskan skema pertukaran informasi dan tindak lanjut dari hasil kerja sama antar LO, dalam hal ini tentu antara BNN – NNCC – NBHP. Berdasarkan gambar di atas pula, informasi berupa informasi tersangka atau kiriman barang mencurigakan bisa dikirim oleh seluruh pihak, tetapi penelitian ini yang memberi fokus penelitian mengenai pemberantasan narkoba di Indonesia, maka tindak lanjut dan pengolahan data informasi dari BNN saja yang dijelaskan. Berdasarkan gambar di atas, informasi akan diterima oleh LO BNN. Informasi tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan memberikannya kepada intelijen lapangan. Setelah itu jika informasi benar, maka intelijen akan memberikan kewenangan kepada direktorat interdiksi dan direktorat pengejaran. Penangkapan membuahkan tersangka. Tersangka pun akan diinterogasi yang dapat membuahkan informasi baru yang jika ada keterkaitan dengan pihak negara luar

<sup>5</sup> I-24/7 memiliki arti bahwa sistem jaringan komunikasi Interpol bekerja selama 24 jam sehari dan tujuh hari seminggu tanpa henti yang terkoneksi ke seluruh negara anggota ICPO-Interpol dengan maksud untuk memfasilitasi pertukaran dan berbagi informasi dalam rangka penanggulangan kejahatan internasional dan penegakan hukum

akan langsung diberikan melalui LO yang ditunjuk. Tindak lanjut pun akan dilakukan oleh pihak terkait. (Wawancara dengan LO BNN untuk Working Group Tiongkok, Fathurrahman, 2015).

Kedua bentuk kerja sama ini merupakan bukti bahwa adanya upaya dibidang pemberantasan sindikat antara Indonesia dan Tiongkok. Berdasarkan data implementasi di atas, efektivitas pun dapat diuji melalui kriteria menurut Martani dan Lubis (1987:55) yang mana kriteria efektivitas dapat dilihat melalui tiga pendekatan, yaitu: Pertama, pendekatan sumber (*resource approach*). Kedua, pendekatan proses (*process approach*), dan ketiga, pendekatan sasaran (*goals approach*). Ketiga pendekatan tersebut kemudian dianalogikan kedalam kerja sama bilateral ini.

Pendekatan sumber dianalogikan sebagai MoU dan Apresiasi dimana sebagai awal mula dan pemicu keberlanjutan kerja sama. MoU antara Indonesia dan Tiongkok telah berjalan sejak Maret 2012. Sedangkan apresiasi ditunjukkan melalui tindakan NNCC dan NBHP yang mengapresiasi penangkapan BNN pada November 2014 dan Januari 2015 (www.beritasatu.com, 2015).

Selanjutnya, pendekatan proses merupakan komunikasi yang berjalan terus menerus atau intensitas komunikasi. Selanjutnya, pendekatan sasaran atau hasil berupa penangkapan jaringan sindikat narkoba yang ada. Kerja sama Indonesia – Tiongkok merupakan contoh dan bukti dari baiknya intensitas komunikasi yang ada dimana bukan hanya memberantas sindikat WN Tiongkok saja, melainkan sindikat-sindikat yang dijalankan WN Nigeria, Pakistan, Malaysia, Indonesia, dan lain-lain. Hampir seluruh kasus sindikat Nigeria yang terungkap di Indonesia berasal dari kerja sama dengan Tiongkok (Pribadi, 2015).

Kepentingan Indonesia terhadap Tiongkok dibidang pemberantasan narkoba tentu muncul akibat sumber utama narkoba di Indonesia adalah Tiongkok dengan negara transit Hong Kong. Pernyataan Tiongkok merupakan sumber utama narkoba di Indonesia ini didasari keadaan tahun 2012-2014 dimana sindikat-sindikat asal Iran, Pakistan, dan Nigeria yang merasa semakin dipersempit gerakannya karena profiling<sup>6</sup> yang dilakukan berbagai negara, memicu beralihnya pusat operasi ke Tiongkok. Perkembangan ini pun terbukti dengan banyaknya kurir yang tertangkap dan mengaku bahwa barang yang diselundupkan berasal dari Tiongkok (news.liputan6.com, 2014).

Kepentingan yang dimiliki Indonesia ini direspon baik oleh Tiongkok, begitu pun sebaliknya. Hal tersebut membuktikan bahwa kerja sama ini memiliki kepentingan dan itikad yang sama. Tiongkok dan Indonesia sama-sama berada di kategori negara “darurat narkoba” (www.antaranews.com). Tiongkok yang memiliki peningkatan pengguna di tahun 2012-2014, tetap diiringi dengan pemberantasan yang tidak pernah menurun. Peningkatan angka pemberantasan mengartikan bahwa tidak ada pengurangan suplai narkoba. Pihak NNCC menyalahkan Myanmar dalam peningkatan penyelundupan dimana 95% narkoba di Tiongkok berasal dari Myanmar hingga tahun 2014. NNCC juga telah memantau melalui dokumentasi inderaja atau dari udara dan menghasilkan adanya lahan yang luas di Myanmar utara yang dipenuhi dengan Opium (Zhang & Chin, 2016:5).

---

<sup>6</sup> Profiling adalah penggambaran tersangka yang dicari berdasarkan jenis – jenis kejahatan yang telah dilakukan oleh segolongan orang atau kelompok tertentu.

Positifnya, Tiongkok bukan pihak yang hanya menyalahkan kemudian diam diri, negara ini justru terus menjalin kerja sama dengan negara 'Golden Triangle' yang nota kesepahamannya telah disepakati sejak tahun 1990an. Bukti keseriusan Tiongkok yang terus berusaha meningkatkan daya pemberantasan adalah dengan cara meningkatkan alokasi dana untuk pemberantasan sindikat narkoba yang rutin per 5 tahun diperbarui. Rencana alokasi tahun 2011-2015 berjumlah 250 juta yuan dimana bernilai lebih besar 50 juta yuan dibanding rencana 5 tahun sebelumnya (Su, 2013). Itikad baik ini pun tentu terpancar dengan kesadaran Tiongkok yang tidak bisa bekerja sendiri, negara ini membutuhkan negara lain untuk membantu (Su, 2013). Pihak-pihak terkait dalam hal ini Indonesia tentu merespon kebutuhan Tiongkok.

Berdasarkan kesamaan kepentingan dan itikad baik dalam memberantas sindikat narkoba, ketiga pihak ini telah menghasilkan beberapa koordinasi yang menghasilkan penangkapan berupa kasus-kasus di Indonesia yang telah diselesaikan. Pemberantasan sindikat narkoba sendiri tentu tidak dapat lepas dari adanya penangkapan. Pada tahun 2012, misalnya, seorang WNI bernama Fabiola tertangkap oleh otoritas Tiongkok karena kedapatan membawa 500 gram heroin yang dibawa dari Malaysia atas perintah pacarnya, Don, yang berkewarganegaraan Nigeria. Don memanfaatkan Fabiola yang tengah hamil untuk menjadi kurir dengan memberinya upah US\$ 500.

Tiongkok yang memiliki aturan untuk tidak menghukum orang hamil akhirnya mendeportasi Fabiola dan meminta pemerintah Indonesia menindak lanjuti kasus penyelundupan ini (Humas BNN, 2012:9). Sesampainya di Jakarta, Fabiola langsung dibawa oleh BNN dan diharuskan menjalankan persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas perbuatannya (metro.news.viva.co.id, 2012). Hal tersebut merupakan bukti dari kerja sama pertukaran informasi identitas tersangka bahkan permintaan Tiongkok untuk menindak lanjuti status hukum tersangka yang ditindak lanjuti Indonesia sesampainya di Jakarta.

Kasus lainnya adalah pengiriman pil methamphetamine sejumlah 1.412.476 butir. Pengiriman ini digagalkan BNN setelah sebelumnya mendapat informasi dari Tiongkok dan DEA bahwa ada pengiriman kontainer dari Shenzhen, Tiongkok. BNN kemudian mengikuti truk pembawa kontainer ini setelah sampai di pelabuhan Tanjung Priok. Kiriman ini kemudian diketahui di peruntukkan kepada Koperasi BAIS (Palka binaan Badan Intelijen Strategis) milik TNI (m.tempo.co, 2012). Oknum TNI AU berpagkat Bripda pun terbukti bersalah dan terkait dengan pengiriman ini (www.beritasatu.com, 2012). Tindak lanjut dari kasus pengiriman 1,4 juta butir methamphetamine dari Tiongkok ini membuahkan hasil dimana adanya penangkapan tiga WN Tiongkok oleh kepolisian Tiongkok. BNN pada saat itu terus berkoordinasi dengan Kepolisian Tiongkok setelah penangkapan WN Tiongkok ini karena ingin mengetahui informasi mengenai modus yang digunakan pelaku (news.detik.com, 2013).

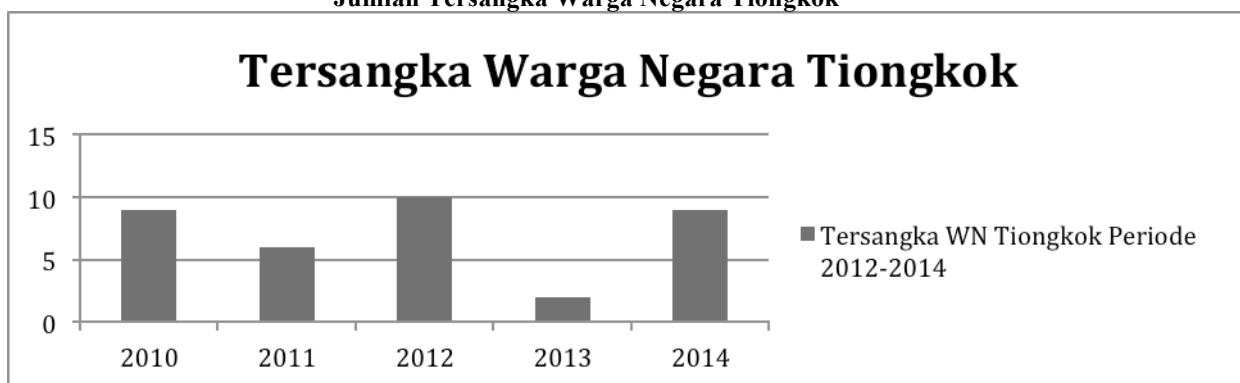
Kasus terakhir ini merupakan kasus besar yang menandakan eratnya hubungan Indonesia dan Tiongkok dalam hal pemberantasan narkoba. Kasus ini juga semakin menandakan itikad baik kedua pihak adalah sama dan menginginkan negara yang bebas dari penyelundupan dan peredaran narkoba. Pada 22 November 2014, BNN menangkap 3 WNA asal Tiongkok yang menyelundupkan 151,5 kg sabu dari Tiongkok ke Indonesia melalui jalur laut (Humas BNN, 2014:4). Xiao, Chen, dan Li adalah 3 WNA yang

ditangkap di kawasan Karang Elok, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Ketiga tersangka ini terkait kedalam jaringan sindikat di Shenzhen, Tiongkok (www.tribunnews.com, 2014).

Berdasarkan beberapa kasus interaksi di atas, kerja sama Indonesia dan Tiongkok dengan bantuan Hong Kong tersebut dapat dikategorikan memiliki intensitas komunikasi yang berkelanjutan. Komunikasi seluruh pihak selalu terjaga dan ada terus menerus dengan hasil yang tidak mengecewakan. BNN sendiri menganggap komunikasi yang diberikan NNCC dan NBHP telah cukup efektif dalam pertukaran informasi dan pencegahan pengiriman prekursor ke Indonesia (www.antaranews.com, 2015).

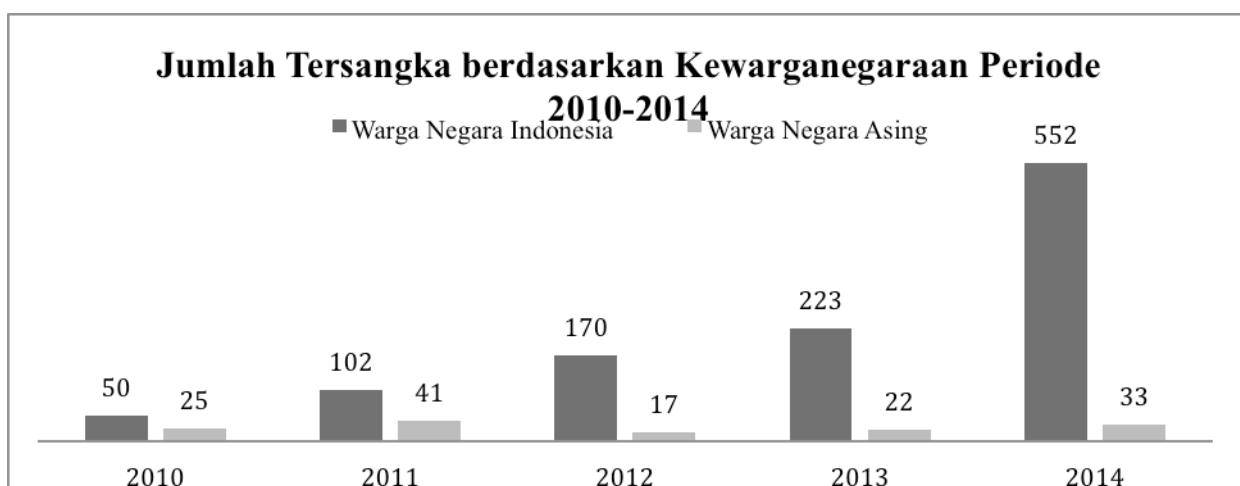
Pendekatan terakhir yaitu pendekatan sasaran atau hasil. Pendekatan ini berupa hasil penangkapan. Kerja sama Indonesia dan Tiongkok ini membawa pengaruh baik dimana kualitas pemberantasan meningkat pesat dari tahun ke tahun terutama pada 2012-2014. Hal tersebut dapat dilihat dalam grafik jumlah tersangka WN Tiongkok pada tahun 2010-2014:

**Grafik 1**  
**Jumlah Tersangka Warga Negara Tiongkok**



Grafik di atas memperlihatkan fluktuasi yang terlihat jelas dan tidak ada peningkatan, namun grafik tersebut menandakan adanya penangkapan setiap tahunnya. Namun, kenyataannya adalah sindikat yang beroperasi di Tiongkok bukan hanya ber WN Tiongkok. Maka dari itu, di bawah ini merupakan data jumlah tersangka berdasarkan kewarganegaraannya yang memperlihatkan peningkatan penangkapan tersangka yang dilakukan BNN:

**Grafik 2**  
**Jumlah Tersangka Kasus Narkotika dan Prekursor Berdasarkan Kewarganegaraan Periode 2011-2014**



Grafik di atas menunjukkan peningkatan signifikan yang terjadi di sisi pemberantasan. Pada tahun 2010 dan 2011 terlihat jumlah penangkapan tersangka tidak terlalu meningkat signifikan. Jumlah ini merupakan hasil dari kondisi BNN yang masih tergolong baru dimana lembaga ini baru berjalan secara penuh baru pada 2009. BNN yang baru lahir ini juga tentu masih belum bekerja optimal karena BNNP (Provinsi) dan BNNK (Kabupaten/Kota) belum tersebar seluruhnya. Alhasil pemetaan sindikat dan pemberantasan di perbatasan masih belum diantisipasi secara maksimal. Hasil tersebut juga dipengaruhi dari minimnya kerja sama yang disepakati antara BNN dengan pihak-pihak lain.

Perubahan mulai terlihat jelas sejak tahun 2012 dimana lembaga BNN di tahun ini juga telah membuat kerja sama dengan Tiongkok. Tahun 2012, jumlah penangkapan tersangka berjumlah 187 orang dengan rincian 170 WNI dan 17 WNA. Tahun selanjutnya yaitu 2013, peningkatan jumlah tersangka juga terjadi dimana jumlah penangkapan tersangka adalah 245 orang dengan rincian 222 WNI dan 23 WNA. Tahun 2014 menjadi peningkatan tertinggi dalam periode ini dimana penangkapan tersangka mencapai 585 orang dengan rincian 552 WNI dan 33 WNA.

Peningkatan pemberantasan sindikat narkoba yang dilakukan BNN pasca adanya kerja sama dengan Tiongkok dan Hong Kong juga semakin terlihat berdasarkan persentase pencapaian pengungkapan sindikat dan penangkapan tersangka BNN sejak 2012-2014. Berikut di bawah ini merupakan persentase pencapaian penangkapan tersangka dan pengungkapan sindikat BNN periode 2012-2014, yaitu:

**Tabel 1**  
**Persentase Pencapaian Pengungkapan Kasus Narkoba**  
**Periode 2012-2014**

Indikator	Tahun	Target Awal	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah kasus peredaran gelap narkoba yang terungkap	2011	Pusat dan Daerah : 46 kasus	Pusat dan Daerah : 97 kasus	Pusat dan Daerah 211
	2012	Pusat dan Daerah : 58 kasus	Pusat dan Daerah : 120 kasus	Pusat dan Daerah 206,9
	2013	Pusat : 64 kasus Daerah : 36 kasus  Total 100 kasus	Pusat : 165 kasus Daerah : 112 kasus  Total 277 kasus	Pusat : 257,8  Daerah : 311,1  Total 277
	2014	Pusat : 70 kasus Daerah : 41 kasus  Total 111 kasus	Pusat : 103 kasus Daerah : 295 kasus  Total 398 kasus	Pusat : 147,1  Daerah : 719,5  Total 358,5

Tabel di atas menjelaskan bahwa setiap tahunnya target awal pengungkapan kasus sindikat narkoba yang dimiliki BNN meningkat dan baiknya diikuti dengan peningkatan persentase pengungkapan yang terjadi setiap tahun. Tahun 2011 dimana target awal sebesar 46 kasus, ternyata dapat terealisasi hingga 97 kasus dengan persentase pencapaian sebesar 211%.

Tahun selanjutnya yaitu 2012, target awal ditingkatkan menjadi sebesar 58 kasus dengan realisasi yang tentu lebih besar yaitu 120 kasus. Peningkatan ini tercatat dalam persentase pengungkapan pada angka 206 %, meskipun hal tersebut lebih rendah



dibanding tahun sebelumnya secara persentase, tetap saja peningkatan secara angka riil terjadi (Humas BNN, 2013:71).

Tahun 2013-2014 merupakan titik dimana peningkatan pengungkapan kasus semakin besar secara angka dan persentase. Tahun 2013 dimana target awal 100 kasus dengan rincian 64 kasus tugas BNN Pusat dan 36 kasus tugas BNN Provinsi dan Kabupaten / kota, ternyata terealisasi hingga 277 kasus dengan rincian 165 kasus diungkap BNN pusat dan 112 kasus diungkap BNN Provinsi dan Kabupaten / Kota. Peningkatan tersebut tercatat dalam persentase hingga 277% (Humas BNN, 2014:67).

Tahun 2014 dimana target awal 111 kasus dengan rincian 70 kasus tugas BNN Pusat dan 41 kasus tugas BNN Provinsi dan Kabupaten / Kota, ternyata terealisasi hingga 398 kasus dengan rincian 103 kasus diungkap BNN Pusat dan 295 kasus diungkap BNN Provinsi dan Kabupaten / Kota. Persentase pencapaian pada tahun 2014 mencapai 358,5 % (Humas BNN, 2015:73).

Peningkatan pencapaian tersebut menjadi bukti bahwa kualitas penyidik BNN juga selalu mengalami peningkatan kualitas termasuk dalam hal kerja sama. Peningkatan angka penangkapan tersangka dan pengungkapan kasus pun berdampak pada jumlah pengguna narkoba di Indonesia yang mengalami penurunan. Hal tersebut dapat dilihat melalui grafik di bawah ini:

**Grafik 3**  
**Jumlah Pengguna Narkoba di Indonesia Tahun 2009-2014**



Grafik di atas menggambarkan jumlah pengguna narkoba di Indonesia sejak tahun 2009-2014. Berdasarkan grafik di atas, jumlah pengguna narkoba pada tahun 2009-2013 terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2009 jumlah pengguna mencapai 3,5 juta orang, kemudian pada 2010 meningkat menjadi 3,8 juta orang, pada tahun 2011 meningkat menjadi 4,2 juta orang, pada tahun 2012 menjadi 4,5 juta orang, dan pada tahun 2013 menjadi 4,6 juta orang. Perbedaan terlihat pada jumlah pengguna narkoba tahun 2014 dimana mengalami pengurangan menjadi 4,1 juta.

Pengurangan tersebut berarti dapat diartikan kedalam penurunan jumlah kematian akibat narkoba di tahun 2014, dimana di tahun-tahun sebelumnya terus terjadi peningkatan. mengatakan bahwa pada 2011 jumlah orang yang meninggal akibat narkoba mencapai 50 orang per hari, sedangkan pada 2014 mengalami penurunan menjadi 33 orang yang meninggal per hari (www.cnnindonesia.com, 2014). Penurunan ini juga terjadi ketika penangkapan tersangka berada dipuncak dimana pada tahun 2014 jumlahnya mencapai 585 orang dan penungkapan kasusnya mencapai 398 kasus.

Data tersebut mengartikan bahwa adanya pengaruh baik dari kerja sama yang berjalan efektif antara Indonesia – Tiongkok. Data penurunan pengguna ini baru terjadi pada tahun 2014, di mana pada tahun itu telah berjalan kerja sama dengan intensitas komunikasi yang sangat baik dan hasil-hasil penangkapan yang selalu di atas target awal serta diikuti peningkatan jumlah. Berdasarkan data-data di atas yang memberi manfaat baik terutama bagi Indonesia dan terus berjalannya kerja sama antar ketiga negara setiap tahunnya, maka kerja sama ini dapat di kategorikan sebagai kerja sama segitiga emas.

## PENUTUP

Kerja sama Indonesia – Tiongkok yang terimplementasi dalam kerja sama BNN – NNCC – NBHP merupakan kerja sama yang efektif dan dapat dikategorikan kedalam kerja sama segitiga emas 2012-2014. Hal tersebut dapat dilihat melalui tiga aspek, yaitu: intensitas komunikasi, tindak lanjut yang berupa penangkapan, dan apresiasi. Saran yang berkaitan dengan hasil penelitian ini adalah masih banyaknya “pekerjaan rumah” yang harus dikerjakan oleh BNN dalam melakukan kerja sama seperti membuat MoU dengan negara-negara ASEAN selain Filipina, meningkatkan upaya pemberantasan dengan menangkap selain kurir, menjalankan MoU yang belum memiliki tindak lanjut, dan peningkatan bentuk kerja sama yang ada seperti diadakannya operasi bersama atau pelatihan bersama.

## Referensi

- Antara News. (24 Agustus 2015). *BNN - Badan Narkotika Tiongkok perkuat kerja sama*. Diakses 19 Juni 2016 dari Antaranews Nasional: <http://www.antaranews.com/berita/514004/bnn-badan-narkotika-tiongkok-perkuat-kerja-sama>
- Beritasatu. (29 Mei 2012). *Anggota Bais TNI Terjerat Kasus Narkoba*. Diakses 27 Mei 2016 dari Megapolitan Berita Satu: <http://www.beritasatu.com/megapolitan/50747-anggota-bais-tni-terjerat-kasus-narkoba.html>
- Beritasatu. (15 Januari 2015). *Ungkap Sabu 850 Kg, Kepolisian Hong Kong Beri Apresiasi BNN*. Diakses pada 7 Agustus 2016 dari Beritasatu.com: <http://www.beritasatu.com/nasional/240865-ungkap-sabu-850-kg-kepolisian-hong-kong-beri-apresiasi-bnn.html>
- BNN. (2014). *Jurnal Data Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2013*. Jakarta: BNN.
- CNN Indonesia. (24 Februari 2015). *BNN: Pengguna Berkurang, Indonesia Masih Darurat Narkotik*. Diakses 6 Juni 2015, dari: <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150224051535-12-34325/bnn-pengguna-berkurang-indonesia-masih-darurat-narkotik/>
- Detik.com. (31 Juli 2013). *3 WNA Jaringan Freddy yang Selundupkan 1,4 Juta Ekstasi Ditangkap BNN*. Diakses 20 Juni 2016 dari deiknews: <http://news.detik.com/berita/2320673/3-wna-jaringan-freddy-yang-selundupkan-14-juta-ekstasi-ditangkap-bnn>
- Deutsch Welle. (4 Mei 2015). *Inilah Negara Produsen Produsen Terbesar Dunia*. Diakses 20 Agustus 2016, dari Deutsch Welle: <http://www.dw.com/id/inilah-negara-produsen-terbesar-narkoba/g-18423509>
- Deutsche Welle. (12 Februari 2015). *PBB: Indonesia Salah Satu Jalur Utama Penyelundupan Narkoba*. Diakses 11 April 2015, dari: <http://www.dw.de/pbb-indonesia-salah-satu-jalur-utama-penyelundupan-narkoba/a-18252054>

- Elshinta.com. (17 Maret 2015). Mengapa Indonesia Darurat Narkoba?. Diakses 10 Juli 2015, dari: <http://elshinta.com/news/5227/2015/03/17/mengapa-indonesia-darurat-narkoba>
- Fathurrahman. (14 Maret 2015). *Jalur Utama Narkoba Tiongkok ke Indonesia*. Diakses 26 Mei 2016 dari Selasar Politik: <https://www.selasar.com/politik/jalur-utama-narkoba-tiongkok-ke-indonesia>
- Fathurrahman. (4 September 2015). Bagaimana cara menindak lanjuti informasi dari pihak lain? (B. A. Bandung, Pewawancara)
- Haluan Kepri. (2016, Juli 26). *China Produsen Narkoba Terbesar Di Kawasan Asia*. Diakses 20 Agustus 2016, dari Haluankepri.com: <http://www.haluankepri.com/batam/93029-china-produsen-narkoba-terbesar-di-kawasan-asia.html>
- Humas BNN. (2012). *Lampiran Press Release Akhir Tahun Badan Narkotika Nasional*. Jakarta: BNN.
- Humas BNN. (2013). *Lampiran Press Release Akhir Tahun Badan Narkotika Nasional*. Jakarta: BNN.
- Humas BNN. (2014). *Lampiran Press Release Akhir Tahun Badan Narkotika Nasional*. Jakarta: BNN.
- Humas BNN. (2013). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Badan Narkotika Nasional*. Jakarta: BNN Republik Indonesia.
- Humas BNN. (2014). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Badan Narkotika Nasional*. Jakarta: BNN Republik Indonesia.
- Humas BNN. (2015). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Badan Narkotika Nasional*. Jakarta: BNN Republik Indonesia.
- Martani, H., & Lubis, H. S. (1987). *Teori Organisasi (Suatu Pendekatan Makro)*. Depok: Pusat Antar Ilmu-ilmu Universitas.
- NNCC. (2014). *Annual Report on Drug Control in Tiongkok 2014*. Beijing: Office of Tiongkok NNCC.
- Pribadi, S (3 September 2015). Bagaimana hubungan Nigeria dan Indonesia dalam pemberantasan narkoba? (B. A. Bandung, Pewawancara)
- Tempo.Co. (26 Desember 2014). *BNN: Indonesia Darurat Narkoba*. Diakses 5 Juni 2015 dari Tempo.Co: <http://m.tempo.co/read/news/2014/12/26/063631115/BNN-Indonesia-Darurat-Narkoba>
- Su, X. (26 September 2013). *China's Antidrug Policies in Southeast Asia's Golden Triangle*. Diakses 18 Juni 2016 dari Asia Pacific Bulletin: <http://www.eastwestcenter.org/sites/default/files/private/apb234.pdf>
- Van Oudenaren, J. (2014). Enduring Menace: The Triad Societies of Southeast China. *Asian Affairs: An American Review*, 127-153.
- Viva News. (1 Maret 2012). *Syarat Jadi Kurir Narkoba: Dihamili*. Dikutip dari Viva.co.id pada 27 Mei 2016: <http://metro.news.viva.co.id/news/read/292626-modus-dihamili-syarat-jadi-kurir-narkoba>
- Warta Kota. (15 Desember 2014). *3 Warga Tiongkok Selundupkan 151 Kg Sabu dalam Manisan Jeruk*. Dikutip dari Tribunnews.com pada 27 Mei 2016: <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2014/12/15/3-warga-tiongkok-selundupkan-151-kg-sabu-dalam-manisan-jeruk>
- Zhang, S. X., & Chin, K.-l. (2016). A People's War: China's Struggle to Contain its Illicit Drug Problem . *Center for 21st Century Security and Intelligence Latin America Initiative* , 1-15.